

Judul : Jalur KRL Melayang : PT KCI Dukung Rencana Pemprov DKI
Tanggal : Minggu, 24 Maret 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 24

Jalur KRL Melayang

PT KCI Dukung Rencana Pemprov DKI

[JAKARTA] PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) bakal mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menghilangkan pelintasan sebidang dengan jalur kereta rel listrik (KRL) layang. Dengan begitu, keamanan dan kenyamanan pengguna KRL maupun pengendara roda dua dan roda empat akan semakin terjaga.

"Kami pasti akan dukung rencana tersebut. Peniadaan pelintasan sebidang akan membuat pengguna KRL semakin terjaga keamanannya dan juga bagi pengendara berlalu lintas lintas lainnya," ujar Kepala Humas PT KCI, Anne Purba, Jumat (22/3).

Meski begitu, kata dia, PT KCI hanya sebagai operator KRL dan tidak berwenang dalam rencana pembangunan infrastruktur, terutama untuk pembangunan



Rangkaian kereta api rel listrik (KRL) Commuterline melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta, beberapa waktu lalu.

rel kereta secara melayang, seperti yang direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Urusan pembangunan infrastruktur, bukan kewenangan kami. Ada instansi lain yang lebih berwenang,"

tuturnya.

Dia telah mendengar akan ada pengajuan rencana pembangunan infrastruktur transportasi publik, termasuk pembangunan pelintasan sebidang menjadi pelintasan atas.

pusat.

Pemprov DKI tidak menginginkan pembangunan *underpass* pada pelintasan sebidang, karena keterbatasan lahan di setiap pelintasan sebidang. Konsep pembangunan yang diusulkan secara melayang.

Di wilayah Daop 1 Jakarta, ada 461 pelintasan sebidang. Dari angka itu, 176 di antaranya merupakan pelintasan resmi dan 285 pelintasan sisanya adalah pelintasan tidak resmi.

Kurang Terawat

Sementara itu, prasarana atau kereta yang kurang terawat disinyalir menjadi salah satu hal penyebab anjaknya KRL Commuter Line di Kebon Pedes, Bogor, Minggu (10/3).

"Yang di Bogor, ada indikasi awal mungkin ada prasarana yang perlu kita lakukan perawatan lebih baik," kata Direktur

Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Zulfikri menuturkan, saat ini evaluasi menyeluruh tengah dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna melihat lebih dalam dari sisi prasarana, sarana, maupun sumber daya manusia yang mengoperasikan kereta tersebut.

"Mungkin sebulan dua bulan ini KNKT akan ada hasil (investigasi)," ujarnya.

Zulfikri menuturkan, beberapa kejadian anjloknya kereta di Jabodetabek sebelumnya juga disebabkan oleh beragam faktor mulai dari wesel yang sudah tua hingga kondisi muatan prasarana yang berlebihan.

"Ini mungkin yang perlu kita lakukan evaluasi," ujarnya. [160]